

BERSAMA BAZNAS TEMANGGUNG Pelatihan Digital Marketing

TEMANGGUNG (KR) - Pelatihan digital marketing diberikan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Temanggung pada 500 muaf. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung Fatchur Rochman mengatakan muaf perlu bimbingan, penguatan dan pelatihan agar mereka berdaya secara ekonomi.

"Bimbingan ekonomi harus dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi para muaf. Langkah ini dilaksanakan kemenag bekerja sama dengan Baznas," jelasnya, Sabtu (9/11). Menurutnya, bimbingan keagamaan bagi muaf terus dilakukan penyuluh agama ke masing-masing desa, sesuai tempat tinggal peserta pelatihan. Diharapkan, mereka yang saat ini menjadi mustahik akan menjadi muzaki dan cita-cita ke depan naik haji.

Fatchur Rochman mengatakan, para muaf bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh nara sumber tentang digital marketing sehingga mereka bisa melaksanakan dan ekonominya menjadi kuat. Digital marketing dinilai sangat penting bagi para muaf karena saat ini trend jual-beli secara online. "Jual-beli ini harus dengan berdasarkan prinsip-prinsip dalam agama Islam, sehingga secara ekonomi para muaf punya kemampuan untuk itu," ungkapnya.

Ketua Baznas Kabupaten Temanggung Manshur Asnawi mengatakan pihaknya tidak sekadar memberi penguatan akidah tetapi juga penguatan di bidang kesejahteraan dengan memberikan tambahan modal usaha dari Baznas. "Pada tahun ini Baznas menganggarkan untuk rumah muaf Rp 250 juta. Tetapi yang 50 persen untuk kegiatan produktif seperti pemberdayaan ekonomi dan pendidikan," jelasnya. (Osy)-f

DILAKUKAN POLSEK KARTASURA Razia Balap Motor Liar



KR-Dok Polres Sukoharjo

Razia balap motor liar di Jalan Ahmad Yani Kartasura.

SUKOHARJO (KR) - Polres Sukoharjo menggelar razia balap motor liar di wilayah Kecamatan Kartasura, Sabtu (9/11) dinihari. Petugas melakukan penyisiran di sepanjang Jalan A Yani Kartasura, mulai dari simpang empat Gembongan hingga Kleco perbatasan dengan Kota Solo. Hasilnya, diamankan 21 pelaku balap motor liar dan 21 unit motor dengan knalpot brong.

Kapolsek Kartasura AKP Tugiy mengawali Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit mengatakan, dalam operasi balap liar kali ini jajaran Polsek Kartasura dibantu oleh jajaran Satuan Samapta Polres Sukoharjo yang dipimpin Kasat Samapta AKP Sri Haryanto. "Razia dilakukan dalam skala lebih besar karena melibatkan jajaran Polres Sukoharjo. Sebelumnya, razia sering dilakukan hanya dari Polsek Kartasura," jelas AKP Tugiy.

Terpisah, Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menegaskan pihaknya melakukan penindakan dengan sasaran pengguna knalpot brong, baik secara kasat mata pengawasan maupun penindakan melalui operasi balap motor liar. Secara keseluruhan, sejak Januari sampai September 2024 sudah disita 4.028 knalpot brong. "Jumlah tersebut masih bertambah, dari hasil operasi November ini," jelasnya. (Mam)-f

Dindik Banyumas Kolaborasi dengan Penegak Hukum

BANYUMAS (KR) - Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Banyumas, Joko Wiyono menyampaikan keprihatinan atas semakin maraknya kasus guru yang dilaporkan ke pihak kepolisian. "Komunikasi yang baik antara guru dan orangtua murid dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi fenomena ini," kata Joko Wiyono, Kamis (7/11) saat diminta komentar.

Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, Dinas Pendidikan Banyumas telah menjalin kolaborasi dengan penegak hukum terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kolaborasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada guru agar mereka dapat menerapkan peraturan yang berlaku dengan bijak. "Membangun komunikasi yang baik antara orangtua, guru, dan sekolah adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi anak-anak," ungkap Joko.

Joko menegaskan bahwa banyak guru sebenarnya ingin menamakan pembelajaran karakter, moral, dan kode etik kepada siswa. Namun, dinamika dan tantangan pendidikan saat ini berbeda dengan masa lalu, sehingga pendekatan yang digunakan guru juga perlu disesuaikan. "Saya meminta guru-guru di Banyumas untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan afektif," tandasnya.

Menurutnya, pendekatan dengan *rasa pangrasa* atau rasa saling memahami akan membangun hubungan yang baik antara guru, orang tua, dan siswa. Joko juga menambahkan pentingnya tenggang rasa antara guru dan orang tua dalam memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan guru di sekolah bertujuan untuk kebaikan siswa, sehingga seharusnya ada dukungan dan pemahaman dari orang tua.

Sebagai langkah konkret, Joko mengimbau agar setiap sekolah memberikan informasi tentang program-program sekolah kepada orang tua di awal tahun ajaran. "Dengan pemberitahuan program, orangtua bisa paham apa yang akan dilaksanakan di sekolah dan mengerti tujuan serta manfaat dari setiap kegiatan," ungkapnya. (Dri)-f

BIDANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 2024

Banyumas Raih Penghargaan Nasional



BANYUMAS (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berhasil meraih penghargaan tingkat nasional dalam ajang Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Jumat (8/11) malam. Banyumas berhasil meraih peringkat ketiga nasional untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten Terbaik.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ir Diana Kusumastuti MT kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Dr Agus Nur Hadie SSos MSi. Sekda menyampaikan rasa bangga atas penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Banyumas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo, mengatakan ini adalah penghargaan pertama bagi Kabupaten Banyumas dalam bidang jasa konstruksi di tingkat nasional. "Penghargaan ini merupakan bukti nyata kerja keras DPU dalam membina dan mengawasi pelaksanaan jasa konstruksi di tingkat kabupaten," ungkapnya, Sabtu (9/11).

Sekda Banyumas juga mengapresiasi kinerja DPU yang berhasil membuktikan diri sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia dalam pembinaan jasa konstruksi. Agus menekankan pentingnya penghargaan ini sebagai motivasi bagi DPU untuk terus memberikan layanan prima kepada pelaku jasa konstruksi di Banyumas.

"Penghargaan ini bukan sekadar penghormatan, tetapi menjadi dorongan bagi kita semua untuk semakin bersemangat dalam membangun iklim konstruksi yang kondusif dan profesional," tandas Agus Nur

Hadie.

Ia berharap DPU dapat terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan, sehingga pembangunan konstruksi yang berkualitas tinggi dapat dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat. Penghargaan ini juga diharapkan menjadi peleton semangat bagi Banyumas agar sektor jasa konstruksinya semakin kompetitif dan siap menghadapi tantangan di masa depan. (Dri)-f



KR-Istimewa

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ir Diana Kusumastuti MT menyerahkan penghargaan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Dr Agus Nur Hadie.

WUJUDKAN SWASEMBADA PADI NASIONAL

Petani Minta Perbaiki Infrastruktur

SUKOHARJO (KR) - Petani meminta pemerintah pusat melakukan perbaikan infrastruktur pertanian untuk merealisasikan target peningkatan hasil panen padi mewujudkan swasembada nasional. Perbaikan mendesak dilakukan mengingat kebutuhan air untuk pertanian sangat tinggi. Sedangkan kondisi sekarang banyak ditemukan kerusakan.

Ketua Gapoktan Tegalmade Mojolaban Joko Suwarsono mengatakan infrastruktur pertanian dimaksudkan antara lain saluran irigasi, talud irigasi dan pintu air. Selain itu juga Dam Colo Nguter sebagai sumber tampungan air terbesar. "Infrastruktur pertanian tersebut selama ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah, namun perbaikan yang sudah dilakukan belum maksimal karena

baru sebagian kecil saja," jelasnya, Sabtu (9/11).

Menurutnya, petani meminta perbaikan infrastruktur pertanian dilakukan secara tuntas, mulai dari hulu di Dam Colo Nguter hingga hilir di sepanjang saluran irigasi di wilayah Kecamatan Mojolaban. "Petani sangat memerlukan revitalisasi infrastruktur pertanian untuk memenuhi kebutuhan air sepanjang tahun untuk. Swasem-

bada pangan nasional akan terwujud kalau swasembada pangan daerah Sukoharjo sudah mampu dipenuhi petani. Setiap tahun surplus beras," tandas Joko Suwarsono.

Masalah lain yang dihadapi petani, lanjut Joko, di saat musim kemarau pintu air Dam Colo Nguter dilakukan penutupan untuk perawatan rutin tahunan. Padahal di saat cuaca panas, petani sangat membutuhkan air untuk jaminan keberlangsungan tanaman padi.

Ketua Gapoktan Rejosari Polokarto, Santoso Budi juga mengatakan pengairan untuk pertanian di wilayahnya masih sangat kurang. Petani membutuhkan air melalui saluran irigasi sampai Desa Rejosari Kecamatan Polokarto. "Air sebenarnya dapat di-

penuhi saat hujan turun. Tapi saat kemarau wilayah menjadi kering sehingga petani minta bantuan pemerintah membuatkan sumur dalam," ungkapnya.

Terpisah, Ketua Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A) Dam Colo Timur, Jigong Sarjanto mengatakan, saluran irigasi di sepanjang aliran Dam Colo Nguter mengalir sangat panjang. Mulai dari wilayah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo hingga masuk Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Ngawi Jawa Timur. "Khusus di sepanjang aliran Dam Colo di wilayah Kabupaten Sukoharjo, memang banyak ditemukan kerusakan. Bahkan ada yang rusak lebih dari 20 tahun tanpa perbaikan," jelasnya. (Mam)-f

PELAKSANAAN PROGRAM KB DI KARANGANYAR

Dasawisma Diminta Ikut Edukasi Remaja

KARANGANYAR (KR) - Tim kerja daerah untuk pelaksanaan program KB dan penurunan stunting di Karanganyar disemangati PKK Jateng. Dalam roadshow kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, Rabu (6/11), Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Shinta Nana Sudjana menyebut pentingnya kader PKK menyukseskan dua program tersebut.

Kepada kader PKK, Shinta menitip pesan agar menebalkan semangat, untuk mengajak dan mengedukasi warga melalui gerakan Dasawisma. "Dasawisma ikut mengedukasi warga dan remaja, agar tidak ada pernikahan dini. Data keluarga yang punya ibu hamil, balita, dan mereka yang belum ber-KB. Ajak ke Posyandu sebagai skrining awal stunting," tegasnya. Shinta bersama rombongan mengunjungi Puskesmas Mojogedang I dan RSUD Karanganyar. Di sana, Shinta meminta kader PKK turut mengedukasi keluarga, dalam pemenuhan gizi rumah tangga. Mereka diharapkan dapat bekerja sama dengan penuntasan stunting di Jateng. "Dalam upaya menurunkan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024,

maka saya *nyuwun* titip kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, agar dapat menggerakkan dan mengoptimalkan peran kader PKK di Dasawisma, dalam upaya penurunan stunting melalui berbagai upaya," tambahnya.

Pj Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pen-

dudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, Ita Kusumawati mengatakan rombongan TP PKK Jawa Tengah meninjau Puskesmas Mojogedang I yang sedang melayani 65 akseptor IUD implan. Rombongan kemudian bergeser ke RSUD Karanganyar untuk melihat penanganan akseptor KB pria atau MoP. iKami diberi semangat, juga diberi bingkisan ke 20 kader PKK. Bingkisan ke lima balita stunting dan pemberian reward kepada 20 kader PKK. Bingkisan ke lima balita stunting dan pemberian reward kepada 20 kader PKK masing-masing Rp1,5 juta dan uang pengganti tidak kerja Rp 450.000. Sedangkan akseptor MoW seorang saja simbolisnya diberi Rp 450.000, i katanya.

Ita mengatakan akseptor MoW maupun MoP di tahun ini memang kurang bergairah. Dari tahun sebelumnya mencapai ratus-

an akseptor, kini tinggal 19 pria saja yang menghendaki KB MoP sedangkan untuk wanita hanya 159 orang. "Tren MoW dan MoP menurun secara drastis. Ini dirasakan di semua daerah. Padahal sudah diberi stimulan uang," jelasnya. Selama kunjungan, tim daerah menyuguhkan simulasi pelaksanaan posyandu siklus hidup implementasi tri bina. Yakni Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Penjabat Ketua TP PKK Karanganyar, Endar Pangestuti Timotius menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam penanganan dan pencegahan stunting. Di antaranya, bekerja sama dengan Korpri, Dharma Wanita, juga CSR perusahaan, dengan memberi sejumlah bantuan untuk penuntasan stunting. (Lim)



KR-Abdul Alim

Pj Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Shinta Nana Sudjana mengunjungi kader PKK Karanganyar.

ALIANSI MAHASISWA PATI DESAK DPRD

Segera Bentuk Pansus Seleksi Perades

PATI (KR) - Sengkarut proses penjurangan perangkat desa (perades) 2024 di Kabupaten Pati terus memantik perhatian banyak kalangan. Sejumlah mahasiswa mendesak DPRD Pati membuat panitia khusus (pansus). Sementara itu, LBH Joelang mengirim surat ke Penjabat Bupati Pati agar membatalkan izin pengisian perades.

Rencana pembentukan Pansus tersebut diungkapkan Ketua DPRD Pati, H Ali Badrudin SE. Usai menggelar audiensi dengan mahasiswa dan Camat, baru-baru ini. Politikus PDIP tersebut menegaskan akan mengkaji perlu-tidaknya membentuk Pansus untuk mengusut dugaan kecurangan pada proses rekrutmen pengisian perangkat desa.

Politisi asal Kayen itu menyatakan tidak bisa membatalkan proses pengisian Perades 2024, karena tahapan sudah dilalui. Namun kalau ditemukan bukti adanya kecurangan, Ali Badrudin minta ca-

mat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Disperdades) untuk bertanggungjawab. "Tidak semua kecamatan ada kesalahan. DPRD memiliki fungsi pengawasan. Nanti Komisi A biar minta rekomendasi Penjabat Bupati. Selanjutnya membentuk pansus," tandas Ali Badrudin.

Juru bicara Aliansi Mahasiswa Pati yang mendatangi DPRD, Arifin meminta agar pengumuman perades terpilih supaya dibatalkan. Dia mendesak wakil rakyat (legislatif), agar membentuk pansus perades.

Sementara itu, Direktur Joelang, Fatmurohman SH MH minta Pj Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko agar membatalkan Surat Nomor 141.4/2661.4 tentang Izin Pengisian Perangkat Desa Tahun 2024. Melalui Suratnya Nomer 009/B /DJOEANG/XI/2024, Fatmurohman menyatakan keberatan atas izin pengisian perades 2024.

Hal tersebut didasarkan UUD

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian, izin pengisian Perangkat Desa Tahun 2024 didasarkan atas Perbup Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbup Nomor 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tThun 2015 tentang Perangkat Desa yang telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018.

"Sesuai peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa jika ada UU yang baru maka peraturan perundang-undangan di bawahnya harus diperbarui setelah UU disahkan dan berlaku. Maka kami keberatan dan meminta Pj Bupati Pati untuk Membatalkan Surat Nomor 141.4/2661.4 tentang Izin Pengisian Perangkat Desa Tahun 2024," tandas Fatmurohman.

Terpisah, presidium LSM Dewan Kota, Drs Pramudya mengungkapkan jika pelaksanaan tes tertulis calon perades ternyata berlangsung di banyak tempat. "Ada yang di UTC Semarang, di IKIP Veteran Semarang, juga ada yang digelar di kantor desa seperti Desa Guyangan dan Sumber Sari Kecamatan Winong. Ada juga yang di kantor kecamatan, seperti di Dukuhseti," jelasnya.

Hingga Senin (4/11), banyak peserta tes tertulis penjurangan perades yang belum mengetahui hasil kelulusan. Sebelumnya, mereka mendapat informasi, jika pengumuman hasil tes adalah Senin ini.

Sebagaimana diberitakan, Pemkab Pati mengeluarkan izin pengisian perangkat desa tahun 2024 di 125 desa (17 kecamatan), yang akan mengisi 264 formasi jabatan perangkat desa. Lowongan terdiri 42 sekretaris desa, serta 222 formasi kepala seksi dan kadus. (Cuk)-f